



**COLLABORATIVE GOVERNANCE PEMERINTAHAN DESA
PANGALENGAN DENGAN PT. ARMANI AGRO SUKSES DALAM
PENGEMBANGAN PASAR WISATA DESA PANGALENGAN
KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG**

¹Haromin, ²Dera Izar Hasanah ³Elvan Nugraha Hermawan

¹Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jawa Barat, Indonesia

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Elvannugraha2001@gmail.com

Received 1 April 2024; Revised: 1 April 2024; Accepted: 2 April 2024; Published: April 2024; Available online: Mei 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Collaborative Governance* pemerintah Desa Pangalengan dengan PT. Armani Agro Sukses dalam pengembangan pasar wisata Desa Pangalengan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus Intrinsik yaitu untuk menggambarkan atau menganalisa dan mempelajari fenomena yang menarik di dalam kasus *Collaborative Governance* pengembangan pasar wisata Desa Pangalengan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Informan yaitu orang-orang yang dipercaya dan telah mengetahui serta paham dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian indikator *Collaborative Governance*, (1) Fase mendengarkan, pihak pemerintah Desa Pangalengan telah mengajak kolaborasi PT. Armani Agro Sukses untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam pengembangan Pasar Desa Pangalengan. (2) Fase dialog, PT. Armani Agro Sukses diundang dan dilibatkan dalam musyawarah untuk menentukan Langkah strategis yang akan dijalankan pengembangan Pasar Wisata Desa Pangalengan. (3) Fase pilihan, penentuan program kerja di tentukan bersama dalam forum musyawarah dan PT. Armani Agro Sukses juga dilibatkan dalam proses evaluasi program.

Kata kunci: *Collaborative Governance*, Pengembangan, Pasar Wisata

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai negara berkembang menjadi agenda global yang tak pernah luput dalam pemberitaan, pergerakan negara berkembang menjadi negara maju

merupakan sebuah ciri kas dalam pemberitaan mengenai agenda tersebut, termasuk salah satunya adalah perkembangan negara Indonesia. Sudah kita ketahui Sejak

jaman dahulu Indonesia selalu bergerak berupaya menuju negara maju dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan meningkatkan hasil devisa nya melalui pembangunan pada sektor industri pariwisata. Industri ini dibangun dengan tujuan agar wisatawan luar negeri banyak datang dan berkunjung membelanjakan uang mereka dalam kunjungannya tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang dua per tiga dari wilayahnya terdiri dari air, sedang satu per tiganya adalah daratan yang tentunya memiliki berbagai macam sektor pariwisata yang mampu menggait wisatawan baik itu lokal ataupun internasional. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang sangat potensial sebagai daerah tujuan wisata dan dapat menjadikan sektor pariwisata, antara lain sebagai salah satu sumber pendapatan negara atau daerah dengan tujuan untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru, mendorong pembangunan ekonomi, pengenalan pelestarian kebudayaan daerah dan yang terpenting yaitu meningkatkan devisa negara.

Wisata merupakan sebuah perjalanan pada tempat tertentu yang dilakukan oleh seseorang untuk berlibur ataupun rekreasi menuju kesuatu tempat. Menurut James J. Spillane yang dikutip dari (Anthony Fransisko Siallagan, 2011), menyebutkan bahwa "Biasanya perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan adalah bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru

dialami oleh orang tersebut atau mengulangi kegiatan yang tidak dilakukan setiap hari di suatu tempat untuk berolah raga, berziarah, bernostalgia, beristirahat, dan menyelesaikan tugas atau mencari informasi tentang sebuah tempat". Oleh karena itu, apabila sebuah daerah memiliki tempat dan tata lingkungan sebagai sumberdaya wisata yang beragam dianggap mampu untuk membantu perkembangan daerah tersebut dan salah satunya adalah Jawa Barat.

Kegiatan usaha di sektor pariwisata di Jawa Barat semakin berkembang dengan meningkatnya ilmu pariwisata. Sektor pariwisata selalu menjadi sektor unggulan dan diandalkan pemerintah untuk dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, keterampilan di bidang pariwisata sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan kemajuan di bidang pariwisata. Jawa Barat dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan keindahan wisata alamnya. Wisata alam seperti, pegunungan, dan laut menjadi sektor wisata yang beragam di daerah Jawa Barat.

Adapun kemudian salah satu tempat wisata pegunungan yang banyak dikunjungi di wilayah Jawa Barat adalah wisata di Kabupaten Bandung lebih tepatnya di wilayah Pangalengan dan Ciwidey. Pangalengan adalah sebuah kecamatan di kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pangalengan terletak 40 km di selatan Kota Bandung atau sekitar 29 km dari ibukota Kabupaten Bandung, Soreang. Pangalengan

terkenal akan beberapa objek wisata, seperti Situ Cileunca, perkebunan teh dan Kolam pemandian air panas Cibolang.

Pangalengan yang juga dikenal sebagai daerah pertanian, peternakan dan perkebunan. Terdapat beberapa perkebunan teh dan kina yang dikelola oleh PTPN. Pangalengan juga merupakan daerah penghasil susu sapi. Peternakan dan pengolahan susu di daerah Pangalengan dan daerah Bandung Selatan lainnya dikelola oleh Koperasi Peternakan Bandung Selatan Pangalengan (KPBS Pangalengan). Pangalengan sendiri memiliki banyak tempat wisata alam dengan nuansa hutan pinus dan sungai di pegunungan.

Dengan adanya kelebihan dalam sektor wisata tersebut tentunya menjadikan wilayah Pangalengan menjadi wilayah dengan tingkat wisatawan yang tinggi di Kabupaten Bandung, akan tetapi seiring perkembangan zaman ditambah dengan persaingan sektor wisata yang menjadi semakin ketat, menjadikan perlu adanya pembeda pada sektor wisata di pangalengan dengan wilayah lain.

Salah satu dari berbagai banyak pembeda tersebut adalah dengan adanya Pasar Wisata Pangalengan yang merupakan bentuk hasil dari kerja sama antara instansi pemerintahan dengan swasta perusahaan yang dalam hal ini Pemerintah Desa Pangalengan dan PT. Armani Agro Sukses sebagai pihak swasta.

Dalam pengembangannya sendiri pasar wisata yang dibangun PT.

Armani Agro sukses di wilayah pemerintahan Desa pangalengan sejatinya merupakan pasar tradisional yang sudah lama berdiri. Perubahan pasar tradisional pangalengan menjadi pasar wisata pangalengan tentunya menjadi sebuah terobosan terutama dalam pengembangan sektor wisata.

Perubahan yang dari awalnya pasar tradisional sebagai tempat untuk memenuhi perekonomian warga setempat berubah menjadi pasar wisata dengan tujuan penjualan oleh-oleh dan *souvenir* pendukung Industri Pariwisata yang ada di wilayah Pangalengan yang tentunya diperuntukan untuk mendorong kembali perekonomian di Wilayah Pangalengan dengan menjual berbagai suvenir baik itu berupa makanan ataupun barang khas dari Pangalengan.

Kemudian dalam masa pengembangan dan penataan pasar wisata, masih menyimpan hal mendasar yang belum terakomodir dan terkelola dengan optimal. Timbulnya permasalahan-permasalahan dalam pembangunan dan penataan pasar wisata Desa pangalengan tentunya menjadi penghambat dalam proses berkembangnya wisata di wilayah pangalengan. Adapun masalah masalah tersebut diantaranya seperti, mangraknya pembangunan pasar wisata selama 4 tahun dari 2018-2022, adanya polemik yang sempat terjadi terkait relokasi pedagang pasar ke tempat pasar sementara (TPS) sewaktu revitalisasi pasar lama, terjadinya konflik antara

pedagang dan pengelola terkait hak milik kios dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai nilai dari pasar wisata itu sendiri.

Masalah-masalah tersebut di atas, sejatinya saling berhubungan satu sama lain yang mengakibatkan adanya protes dari masyarakat terutama dari kalangan pedagang yang menyebabkan terjadinya konflik pada saat dan setelah pembangunan pasar tersebut. Permasalahan-permasalahan tersebut pada akhirnya membuat pemerintah Desa yang seharusnya menjadi fasilitator serta regulator kepada masyarakat dalam pengelolaan pasar wisata pangalengan menjadi kewalahan dan tidak bisa terselesaikan, maka dari itu perlu adanya lembaga baik itu pemerintah dan non pemerintah seperti swasta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Collaborative Governance

Dikutip sebagaimana menurut Ansell dan Gash dalam (Retno Sunu Astuti, 2020) yang menyebutkan bahwa Istilah *collaborative governance*, merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik". Dalam hal ini lingkup yang dimaksud pada *collaborative governance* adalah ada pada kebijakan dan masalah publik.

Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus diantara para pemangku kepentingan.

Kemudian dalam beberapa catatan dijelaskan bahwa *Collaborative governance* sendiri sudah selayaknya menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik sebagaimana dengan apa yang dituliskan oleh O'Leary dan Bingham dalam (Sudarmo, 2015) yang menyebutkan bahwa kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses memfasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian.

Berdasarkan pada beberapa penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan "sesuatu hal" yang melibatkan semua pemangku kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, berorientasi dan terjadi musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, dalam rangka mencapai tujuan bersama. Lalu dalam proses pelaksanaan *Collaborative governance* Ratner dalam (Retno Sunu Astuti, 2020) menyebutkan bahwa ada tiga fokus fase atau tiga tahapan yang termasuk kedalam proses kolaborasi (*Collaborative Governance Assessment*) yang bisa menjadi indikator penilaian sejauh mana proses

kolaborasi berjakan, seperti pada gambar di bawah:

Gambar 1. Proses Kolaborasi menurut Ratner



Sumber: (Retno Sunu Astuti, 2020)

1) Identifikasi Hambatan dan Peluang (*Identifying Obstacles and Opportunities*)

Fase pertama ini adalah fase mendengarkan. Pada tahap ini para pemangku kepentingan yang melakukan kolaborasi melakukan identifikasi mengenai berbagai jenis hambatan yang akan dihadapi selama proses kolaboratif. Pada tahap ini setiap pemangku kepentingan saling menerangkan mengenai permasalahan, dan pemangku kepentingan lain saling mendengarkan setiap permasalahan yang diterangkan oleh setiap pemangku kepentingan yang terlibat. Kemudian memperhitungkan mengenai peluang dalam penyelesaian setiap permasalahan yang telah diidentifikasi, seperti solusi dari permasalahan yang akan terjadi.

2) Strategi Debat untuk Mempengaruhi (*Debating Strategies for Influence*)

Pada tahap ini adalah fase dialog, pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi melakukan dialog ataupun diskusi mengenai hambatan yang telah diterangkan pada fase pertama. Diskusi yang dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat meliputi diskusi mengenai langkah yang dipilih sebagai langkah yang paling efektif untuk memecahkan permasalahan. Kemudian mendiskusikan mengenai pihak-pihak yang mampu mendukung penyelesaian permasalahan dalam kolaborasi yang telah diterangkan.

3) Merencanakan Tindakan Kolaborasi (*Planning Collaborative Actions*)

Setelah melalui tahap mendengarkan mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam proses kolaborasi dan melakukan diskusi mengenai penentuan strategi yang efektif untuk mengantisipasi permasalahan, pada tahap ini pemangku kepentingan yang terlibat akan mulai melakukan perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang telah didiskusikan pada tahap sebelumnya, seperti langkah awal yang akan dilakukan dalam proses kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Kepariwisata

Kepariwisata adalah aktivitas perjalanan dan tinggal seseorang di luar tempat tinggal dan lingkungan selama tidak lebih dari satu tahun berurutan, dan memiliki tujuan untuk berwisata, bisnis atau tujuan lain dengan tidak untuk bekerja di tempat yang dikunjungi tersebut. Sedangkan dalam pengertian ahli menurut Menurut Hunzieker dan Krapf dikutip dalam (Komang Trisna Pratiwi Arcana, 2022) disebutkan bahwa parawisata merupakan serangkaian jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara.

Dalam hal ini peneliti berpendapat dari kegiatan wisata yang saat ini eksis dilakukan pada banyak kalangan dengan tujuan untuk beristirahat dari kegiatan yang biasanya dilakukan setiap hari seperti bekerja, sekolah dll. Maka yang dilakukan adalah mencari destinasi wisata di luar tempat tinggal dengan tujuan untuk beristirahat untuk sementara waktu, menghibur diri, *refreshing*, atau dengan sebutan kalangan orang zaman sekarang ini mereka menyebutnya dengan sebutan *Healing*.

Pasar Wisata

Secara umum pengertian mengenai Pasar Wisata tidak jauh berbeda dengan pasar biasa yang dapat dimaknai sebagai tempat bertemunya permintaan dan

penawaran atau konsumen dan produsen atau lebih jelasnya tempat perantara bagi penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran. Adapun yang menjadi pembeda adalah mengenai keberadaan objek wisata yang menjadi nilai tambah dalam proses transaksi yang terjadi di Pasar Wisata.

Kemudian apabila kita ingin merujuk kepada pengertian secara rinci mengenai pasar wisata mungkin saja dapat dikatakan bahwa pasar wisata merupakan bentuk penggabungan dari dua fungsi secara terpadu untuk mewadahi segala produk dan kreatifitas pengrajin, yang didalamnya terdapat proses jual beli dan promosi mengenai produk kerajinan serta sebagai sarana aktivitas rekreasi alternatif bagi para pengunjung wisata.

Pemerintah Desa

Menurut (Rendy Adiwilaga, 2020) dalam buku *Sistem Pemerintahan Indonesia* mengemukakan bahwa pada dasarnya, unit pemerintahan paling rendah di negara Indonesia adalah Desa. Konsep Desa sebagai entitas sosial sangat beragam, yaitu sesuai dengan maksud dan sudut pandang yang hendak digunakan dalam melihat Desa. Sebutan Desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga dapat berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi dihadapan pihak atau kekuatan lain.

Dalam hal ini (Rendy Adiwilaga, 2020) menjelaskan bahwa pada umumnya, Desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan

penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan pada umumnya masyarakat bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan

Berlatak berlakang pada pengertian tersebut dengan demikian pemerintahan Desa dapat dikatakan merupakan suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Adapun kemudian dalam proses pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik. (Creswell, 2019) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif digunakan sebagai metodologi yang menyediakan alat-alat dalam memahami arti secara mendalam yang tentunya dalam hal ini berkaitan dengan kolaborasi pemerintah Desa Pangalengan dan PT. Armani Agro Sukses dalam pengembangan Pasar Wisata Pangalengan.

Dalam hal ini, Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau memengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau

kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia.

Kemudian dalam pengertian pendekatan studi kasus intrinsik, (Creswell, 2015) menjelaskan bahwa pendekatan studi kasus intrinsik merupakan sebuah uraian serta penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek yang dimiliki seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, atau suatu program, maupun suatu situasi sosial. Studi kasus digunakan untuk memberikan suatu pemahaman terhadap suatu yang menarik perhatian, suatu peristiwa konkret, proses sosial.

Selanjutnya dalam menopang penelitian ini peneliti menggunakan Teknik penentuan informan *purposive sampling* yang dipadukan dengan teknik penentuan informan yang terbagi menjadi dua yaitu *key informan* dan *secondary informan*. Sedangkan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi berupa observasi, wawancara dan studi dokumen.

PEMBAHASAN

Collaborative Governance dalam penelitian ini merujuk kepada kolaborasi atau kerjasama pihak instansi pemerintahan Desa Pangalengan dengan pihak PT. Armani Agro Sukses yang berjalan dibidang pengembang atau pembangun pasar tradisional Desa Pangalengan menjadi Pasar Wisata Desa Pangalengan. Dalam hal ini kedua belah pihak pemangku kepentingan bekerjasama dalam pemecahan permasalahan mengenai pembangunan dan pengembangan pasar di Desa Pangalengan.

Adapun kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan model *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ratner dalam (Retno Sunu Astuti, 2020) dalam melihat dan menganalisa mengenai bagaimana *Collaborative Governance* yang dilakukan Intansi pemerintahan Desa Pangalengan dengan PT. Armani Agro Sukses dalam pengembangan Pasar Desa Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

1. Identifikasi Hambatan dan Peluang (*Identifying Obstacles and Opportunity ies*).

Fase pertama ini adalah fase mendengarkan. Pada tahap ini para pemangku kepentingan yang melakukan kolaborasi melakukan identifikasi mengenai berbagai jenis hambatan yang akan dihadapi selama proses kolaboratif. Menurut Ratner (2012), Identifikasi Hambatan dan Peluang (*Identifying Obstacles and Opportunity ies*) ini meliputi tiga pembahasan yaitu, Apa masalah utama yang harus diatasi, Siapa aktor kunci yang mempengaruhi keputusan dibidang ini, apa yang bisa kita capai bersama.

Adapun dari hasil penelitian, ditemukan bahwa permasalahan awal yang menjadi Langkah awal kolaborasi adalah permasalahan mengenai pendanaan pembangunan yang tidak siap. Disamping itu penghasilan asli Desa (PAD) minim dan tidak dapat membantu kepada kebutuhan pendanaan pembangunan. Maka dari itu pemerintahan Desa melakukan kolaborasi dengan menunjuk intansi swasta PT. Armani Agro Sukses dengan kriteria perusahaan yang

dapat membantu kepada pembangunan Pasar Desa itu sendiri. lalu kedua mengenai aktor kunci yang dapat mempengaruhi Keputusan dalam hal ini pemerintah Desa Pangalengan yang memegang alih pengelolaan pasar pangalengan sejak diterbitkannya Permendagri no.47 tahun 2007 pasar yang tentunya menjadi aktor kunci dalam pengambilan keputusan. Dan terakhir mengenai kesepakatan yang bisa dicapai bersama adalah mengenai adanya kesepahaman mengenai faktor peningkatan ekonomi dalam hal lain keuntungan bagi kedua belah pihak baik itu pemerintah Desa ataupun Swasta yang dalam hal ini PT. Armani Agro Sukses.

Maka berdasarkan pada hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini seperti yang telah dikemukakan di atas yang menjadi permasalahan utama Pasar Desa Pangalengan ialah dalam hal pemabangunan. Setelah pemerintah Desa melakukan kolaborasi dengan pihak PT. Armani Agro Sukses maka apapun yang menjadi masalah finansial dalam pembangunan Pasar Desa dapat dipenuhi perusahaan. Dengan demikian ada hal yang bersama-sama dapat dicapai oleh kedua belah pihak dalam segi keuntungan yang dapat dihasilkan untuk bersama.

2. Strategi Debat untuk Mempengaruhi (*Debating Strategies for Influence*)

Pada tahap ini adalah fase dialog, pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi melakukan dialog ataupun diskusi mengenai hambatan yang telah diterangkan

pada fase pertama. Diskusi yang dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat meliputi diskusi mengenai langkah yang dipilih sebagai langkah yang paling efektif untuk memecahkan permasalahan.

Kemudian mendiskusikan mengenai pihak-pihak yang mampu mendukung penyelesaian permasalahan dalam kolaborasi yang telah diterangkan.

Dalam hal ini kedua belah pihak pemerintah Desa maupun instansi melakukan audiensi dalam mensosialisasikan suatu perubahan yang akan dilakukan terhadap pasar Desa dengan membahas mengenai faktor penghambat dan pendukung dalam proses kolaboratif. Dengan demikian dalam sosialisasi tersebut dilakukan verifikasi terus menerus terhadap perkembangan kolaboratif yang dibarengi pemberian Solusi yang membangun untuk dapat mengikuti segala perubahan atau perbaikan pasar yang optimal.

Dalam proses sosialisasi ini tentunya semua pihak yang terlibat tidak dapat bergerak dan berdiri sendiri diperlukan tentunya pihak atau kelompok lain yang dapat dijadikan sebagai faktor pendukung kepada berjalannya kegiatan membangun pada perkembangan proses kolaboratif yaitu dengan dilibatkannya tokoh masyarakat, kelompok masyarakat dan pedagang demi terselenggaranya pengembangan pasar Desa yang optimal dengan tentunya pada akhirnya tidak lepas dari pro dan kontra.

Banyak hal yang tentunya menjadi faktor penghambat dalam

setiap kegiatan yang diselenggarakan pada kolaborasi ini. Seperti halnya ketika pada saat revitalisasi pasar dilakukan ada pihak-pihak yang menjadi faktor terhambatnya kelangsungan kegiatan berjalan seperti masyarakat dan pedagang yang mungkin belum memahami alur akan kemana kegiatan ini membawa pasar yang notabene pasar sebagai tempat mereka mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Maka dari itu untuk memecah kebutuntuan tersebut pihak lembaga kabupaten ikut dilibatkan untuk membantu melakukan audiensi kepada para tokoh pedagang masyarakat dalam mensosialisasikan bahwasanya pasar akan dibangun dan diperbaiki agar lebih meningkatkan kenyamanan bagi pedagang dan juga pengunjung, namun mungkin akan ada banyak kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan karena pembangunan pasar menyangkut pihak-pihak yang membantu terjadinya proses revitalisasi.

3. Merencanakan Tindakan Kolaborasi (Planning Collaborative Actions).

Setelah melalui tahap mendengarkan mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam proses kolaborasi dan melakukan diskusi mengenai penentuan strategi yang efektif untuk mengantisipasi permasalahan, pada tahap ini pemangku kepentingan yang terlibat akan mulai melakukan perencanaan mengenai implementasi dari setiap

strategi yang telah didiskusikan pada tahap sebelumnya, seperti langkah awal yang akan dilakukan dalam proses kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Menurut Eman Sulaeman sebagai Kasipem Desa Pangalengan bahwa:

“apapun yang kita lakukan dari mulai perencanaan pembangunan pasar setelah dan sebelum kolaborasi dengan perusahaan terjamin, selalu mengedepankan musyawarah antar staff pemerintahan Desa maupun dengan masyarakat. Demikian dalam kolaborasi tentunya harus selalu dilakukan musyawarah antar yg berkepentingan dalam menyampaikan aspirasi, masalah, hambatan dan potensi Desa atau pasar Desa seperti apa. Lalu dibentuk perencanaan hingga realisasi programnya tentu perlu melewati musyawarah dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian dari Desa juga”.

Sejatinya proses pengembangan Pasar Wisata di Pangalengan sudah direncanakan dari tahun 2012 akan tetapi baru terealisasi ditahun 2015, dengan adanya proses yang Panjang tersebut tentunya ada hal memang sudah dipersiapkan melalui perencanaan-perencanaan kegiatan apa yang akan dilakukan bersama setelah terjalannya Kerjasama antara kedua pihak. Maka hal yang pertama kali

dilakukan adalah melakukan audiensi tertutup dan terbuka.

Audiensi tertutup antara pemangku kepentingan dilakukan untuk meninjau sejauh mana tingkat peluang dan hambatan yang akan diraih dan dihadapi bersama-sama. Lalu kemudian dalam sebagai tindak lanjut audiensi tertutup tersebut dilaksanakanlah audiensi terbuka dengan mengundang tokoh Masyarakat, masyarakat dan pedagang guna mensosialisasikan kegiatan yang akan dilakukan sebagai proses perubahan atau pengembangan pasar.

Dengan proses audiensi yang Panjang tersebut pada akhirnya, terbentuklah kesepahaman untuk mengubah pasar Desa Pangalengan menjadi pasar modern dengan konsep pasar wisata yang akan dijadikan sebagai penyedia barang yang menjadi ke khas-an dari pada wilayah Pangalengan. Dengan harapan pasar wisata tersebut mampu mendorong perekonomian Masyarakat, membantu PADes Desa Pangalengan dan memberikan keuntungan secara material kepada pihak swasta. Terlebih selama 2 tahun kebelakang sampai sekarang ini wilayah pangalengan menjadi wilayah yang hits dan banyak dikunjungi para wisatawan baik itu dari jawa barat ataupun luar jawa barat.

Adapun kemudian, Pasar wisata Desa Pangalengan yang kini dikelola oleh PT. Armani Agro Sukses ini dikontrak selama 15 tahun dari awal pembangunan sampai pengelolaannya sekarang. Namun dikarenakan Kerjasama perusahaan dan pemerintahan Desa

Pangalengan ini akan terjalin 15 tahun kedepan, dengan demikian, pengelolaan Pasar Wisata Desa Pangalengan tidak lepas dari pihak pemerintahan Desa yang bekerjasama untuk mengelola Pasar yang dilakukan oleh BUMDES (badan usaha milik Desa). Dan hasil dari pada pengelolaannya dilakukan sistem bagi hasil agar manfaatnya sama-sama didapat selama Kerjasama berjalan.

PENUTUP

Collaborative Governance pemerintahan Desa Pangalengan dengan PT. Armani Agro Sukses dalam pengembangan Pasar Wisata Desa Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung merupakan tindak kolaborasi pemerintahan dengan pihak ketiga yang dilakukan melalui prosedur *Momerandum of Understanding* (MOU) dalam Upaya mengembangkan pasar tradisional milik Desa Pangalengan yang berada di wilayah Desa pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung menjadi Pasar Wisata Pangalengan.

Dengan dilakukannya kolaborasi tersebut selalu ada pro dan kontra yang terjadi dari kalangan masyarakat dan tokoh pedagang dan kelompok-kelompok yang merupakan bagian dari pasar Desa pangalengan itu sendiri. Dengan demikian, kolaborasi yang baik tentunya mempunyai proses yang tidak mudah dilakukan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti selama 3-4 bulan dengan menganalisa fenomena apa

saja yang terjadi dan sikap apa saja yang dilakukan para pemangku kepentingan dalam menyikapinya dan memutuskan suatu solusi yang akan dilakukan guna sebagai pemecah masalah-masalah yang terjadi dan menghambat berjalannya program dalam proses kolaborasi yang terjalin sehingga kolaborasi yang dilakukan berjalan dengan efektif.

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah peneliti jabarkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Pengembangan atau pembangunan Pasar Tradisional Desa Pangalengan menjadi Pasar Wisata Desa Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung telah melakukan *collaborative governance* dengan PT.Armani Agro Sukses yang tergambar dari (1).*Fase* mendengarkan, pihak pemerintah Desa Pangalengan telah mengajak kolaborasi PT. Armani Agro Sukses untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam pengembangan Pasar Desa Pangalengan. (2) *Fase* dialog, PT. Armani Agro Sukses diundang dan dilibatkan dalam musyawarah untuk menentukan Langkah strategis yang akan dijalankan pengembangan Pasar Wisata Desa Pangalengan. (3) *Fase* pilihan, penentuan program kerja di tentukan bersama dalam forum musyawarah dan PT. Armani Agro Sukses juga dilibatkan dalam proses evaluasi program.

DAFTAR PUSTAKA

Anthony Fransisko Siallagan, E. P. (2011). Analisis Permintaan

- Wisatawan Nusantara Objek Wisata Batu Kursi Siallagan Kecamatan Simanido Kabupaten Samosir. *Jurnal Analisis Permintaan Wisatawan Nusantara*, 1-28.
- Creswell, J. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Memilih Di Antara Lima Pendekatan) Edisi ke-3*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Creswell, J. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Komang Trisna Pratiwi Arcana, I. B. (2022). *Analisis Persepsi Pengunjung Kebun Raya Bali menggunakan Importance-Performance Analysis*. Bali: Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata.
- Rendy Adiwilaga, Y. A. (2020). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Retno Sunu Astuti, H. W. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif administrasi publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Sudarmo. (2015). *Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance*. Surakarta: UNS.